RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2013 – 2017

KECAMATAN BEUTONG
KABUPATEN NAGAN RAYA
2014

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam system Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Beutong mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Beutong, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Beutong dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 – 2017 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi,tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renstra Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 – 2017 ini

merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Beutong. Sejajar dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 – 2017 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Nagan Raya. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Renstra (rencana kerja) Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya selama satu tahun anggaran.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 – 2017 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. Renstra Tahun 2013 – 2017 ini berpedoman pada RPJMD Tahun 2013 – 2017 dan merupakan pelaksanaan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 dan sekaligus mempertimbangkan azas berkelanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 – 2013 ;
2. Renstra Tahun 2013 – 2017 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Propinsi Aceh dan RPJMD Kabupaten Nagan Raya;
3. Renstra Tahun 2013 – 2017 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renstra) SKPD ;
4. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renstra untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD) ;

1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPK) Kantor Camat Beutong Kabupaten Nagan Raya adalah :

1. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan pembangunan Kecamatan dan peningkatan kinerja aparatur.
2. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang baik meliputi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
3. Merumuskan kebijakan tentang konsep tata ruang yang aspiratif

4. Mengembangkan penelitian dan sistem penyaringan informasi yang lebih mutakhir.

Sasaran yang ditetapkan Kantor Camat Beutong Kabupaten Nagan Raya baik dalam jangka satu tahun kedepan atau Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya sistem perencanaan pembangunan Kecamatan dan peningkatan kinerja aparatur yang lebih baik.
2. Tercapainya sistem manajemen pemerintahan Kecamatan yang lebih responsive dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Tingkat Kecamatan.
3. Memiliki konsep tata ruang sebagai bahan referensi dan acuan untuk pengembangan tata ruang wilayah Kecamatan yang aspiratif.
4. Memiliki data yang akurat dan mutakhir sebagai bahan bagi peningkatan pembangunan di Tingkat Kecamatan.

1.2. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renstra Tahun 2013-2017 Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya adalah:

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara *Pendahuluan* Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
15. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017.
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus ;
18. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010 Nomor 15) dan;
19. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 – 2017 (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 Nomor 12);

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) KANTOR CAMAT BEUTONG Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyahikan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, landasan hokum secara sistematika penulisan

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renstra SKPK, Proses Penyusunan Renstra SKPK, Keterkaitan antara Renstra SKPD dengan Dokumen RKPK, Renstra SKPK, degan Renstra

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renstra Kantor Camat Beutong Tahun 2013.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renstra SKPK.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPK, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPK

Bab ini menyajikan tentang kedudukan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya aparatur, prasarana dan sarana kerja serta kinerja pelayanan Kantor Camat Beutong Kabupaten Nagan Raya 5 (lima) tahun sebelumnya.

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menyajikan permasalahan dan isu strategis yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Kantor Camat Beutong Kab. Nagan Raya secara Internal maupun eksternal yang sinergis memberikan kontribusi terhadap keberhasilan visi dan misi yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah Kab. Nagan Raya.

BAB IV VISI, MISI,TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan tentang Visi, misi, strategi dan kebijakan Kantor Camat Beutong Kab. Nagan Raya tahun 2013-2017 dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menyajikan tentang program, kegiatan, indicator kinerja dan pendanaan indikatif Kantor Camat Beutong Kab. Nagan Raya tahun 2013-2017 serta indicator kinerja, kelompok sasaran dan pagu anggaran indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA

Bab ini menyajikan tentang indikator kinerja Kantor Camat Beutong Kab. Nagan Raya tahun 2013-2017 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukug pencapaian tujuan dan sasaran RPJMK kab. Nagan Raya berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMK.

BAB IV PENUTUP

Menyajikan tentang kesimpulan rencana penelitian pengembangan daerah pada tingkat visi, misi, kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan, serta program transisi untuk mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah dan kaidah pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT BEUTONG

2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya, telah ditetapkan Organisasi, Kewenangan dan tugas dari Kecamatan Beutong terdiri dari :

a. Camat
b. Sekretariat
c. Seksi-seksi;subbag dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional

Camat mempunyai tugas umum pemerintah meliputi :

a. Memimpin dan membina Kecamatan dalam Pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dari kebijakan Pemerintah Daerah;
b. Menyiapkan Kebijakan Umum Daerah di bidang Pemerintahan Kecamatan;
c. Mengkoordinir kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
d. Mengkoordinir Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Pemeliharaan sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan umum serta Penyelenggaraan ditingkat Kecamatan.
e. Melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
f. Melaksanakan tugas-tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidag tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat membawahi satu Sekretariat dan 5 seksi,dengan tugas Sekretariat dan masing-masing Seksi sebagai berikut :

1. **Sekretariat**

   Sekretariat mempunyai tugas melakukan Pembinaan dan Pengelolaan Adiministrasi Umum, Kelengkapan, Keuangan, Kepegawaian, Penataan Arsip, Organisasi dan Tata Laksana Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Strategis, Program Kerja, Evaluasi dan Pelaporan serta Pelayanan Administrasi kepada seluruh Unit Kerja dilingkungan Kecamatan.

   Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub bagian yaitu Sub bagian Umum dan Sub bagian Keuangan. Masing-masing Sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab keapada Sekretaris. Masing-masing Sub bagian mempunyai tugas yaitu Sub bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Administrasi Umum

seluruh Unit Kerja dilingkungan Kecamatan dan Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Keuangan seluruh Unit Kerja dilingkungan Kecamatan.

2. **Seksi Tata Pemerintahan**

   Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan.

3. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

   Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Desa.

4. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

   Penyusunan Pedoman dan petunjuk teknis Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

5. **Seksi Keistimewaan Aceh**

   Seksi Keistimewaan Aceh mempunyai tugas Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh di bidang Pendidikan, Adat-istiadat, Budaya dan Agama di Kecamatan.

6. **Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga**

   Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas menyiapkan bahan Penyusunan Pedoman dan Petunjuk teknis Pelaksaan Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga.

7. **Sub Bagian Keuangan**

   Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dan penatausahaan keuangan kecamatan.

   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

   a. Penyusunan rencana pengelolaan anggaran keuangan Kecamatan;
   b. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan anggaran Kecamatan;
   c. Pelaksanaan penatausahaan keuangan anggaran Kecamatan;
   d. Pelaksanaan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya;
   e. Pengendalian dan evaluasi laporan keuangan Kecamatan;
   f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan;

Gambar 1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

KECAMATAN BEUTONG

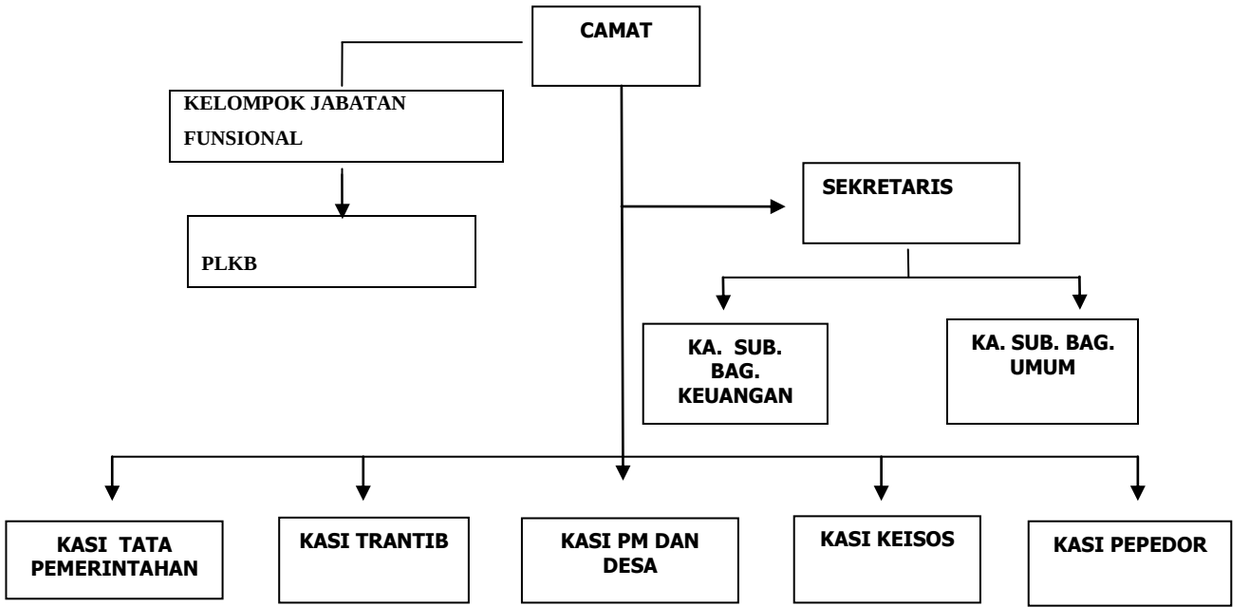

2.2 SUMBER DAYA

2.2.1 Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Beutong

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan pada kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

Tabel berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Camat Beutong

Sarana dan Prasarana Kantor Camat Beutong

No.	Jenis	Jumlah	Ket.
1.	Sarana		
	- Meja Kerja	16 buah	
	- Kursi Kerja	15 buah	
	- Kursi Kerja Pejabat	2 buah	
	- Kursi Tamu	2 set	
	- Almari/Lemari Arsip	7 buah	
	- Rak Arsip	1 buah	

	- Meja Podium	1 buah	
	- Felling Kabinet	11 buah	
	- AC	5 Unit	
	- Komputer	12 unit	**1 unit rusak**
	- Bangku ruang tunggu	2 buah	
	- Laptop	1 buah	**Rusak Berat**
	- Televisi	1 buah	
	- Printer	12 buah	
	- Kamera	2 buah	**1 Rusak**
	- Meja Komputer	4 buah	
	- Mobil Dinas	1 unit	
	- Motor Dinas	3 unit	**1 unit Kurang layak**
2.	Prasarana		
	- Gedung Kantor	1 Unit	
	- Gedung Pertemuan	1 Unit	
	- Kamar Mandi	2 Unit	
	- Rumah Dinas	1 Unit	

2.2.2 Sumber Daya Manusia

Kabupaten Nagan Raya merupakan Pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2002 dengan empat Kabupaten lainnya dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya,

Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Tamiang, yang diresmikan pada tanggal 22 Juli 2002.

Kantor Camat Beutong merupakan salah satu Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya yang terdiri dari 4 Kemukiman dan 24 Gampong Difinitif yang dipimpin oleh Keuchik Gampong, masing – masing Gampong sebagai mitra kerja Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas – tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.

Kecamatan Beutong yang beribukota Babussalam memiliki luas wilayah sekitar 1.243,52 Km^2 atau 34,33 % dari luas Wilayah Kabupaten Nagan Raya. Dengan jarak Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten 21 KM.

Kecamatan Beutong berbatasan sebagai berikut :

- ☑ Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang
- ☑ Sebelah Selatan berbatas dengan Kec.Tadu Raya dan Kab. Aceh Barat Daya
- ☑ Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Aceh Tenggara
- ☑ Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Seunagan Timur

Wilayah Kecamatan Beutong sebahagian luas adalah Areal Persawahan, Perladangan/Perkebunan dan Permukiman. Dengan kondisi tanahnya berupa Alluvial Terakhir (AT), Lapisan Pithasit Tua (LPT) dan Lapisan Pithasit Muda (LPM).

Jumlah Penduduk Wilayah Kecamatan Beutong Berjumlah + 13.051 Jiwa dengan Kepadatan Penduduk rata-rata 10 Jiwa/Km^2 dan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakatnya sebahagian besar adalah sektor Pertanian, Perdagangan dan Sebahagian kecil PNS.

Kecamatan Beutong memiliki berbagai sarana prasarana dalam hal Pendidikan dimana di Kecamatan Beutong terdapat SD Negeri berjumlah 15 (lima belas) Unit, MIN 1 (satu) Unit sedangkan SLTP Negeri berjumlah 3 (tiga) Unit, MTsN Swasta 1 (satu) Unit, SMU 2 (dua) Unit dan untuk pendidikan non formal terdapat Pesantren sebanyak 3 (tiga) unit termasuk Pesantren inti dan 9 (sembilan) unit Pesantren Perdesaan. Dalam hal Kesehatan Kecamatan Beutong juga memiliki 1 (satu) Unit Puskesmas Pembantu dengan tenaga Kesehatan berjumlah 3 Orang Dokter dan 37 Orang Bidan serta para medis lainnya. Dapat disampaikan pula bahwa di Kecamatan Beutong juga telah dibangun 1 (satu) Unit Rumah Sakit Rawat Inap yang telah di Operasionalkan untuk kepentingan Masyarakat Beutong Khususnya dan Masyarakat luar Kecamatan Umumnya.

Kecamatan Beutong berada pada dataran yang relatif datar dan sedikit daerah perbukitan. Penggunaan lahan di Kecamatan Beutong pada umumnya berupa 1.725 Ha persawahan, 2.000 Ha perladangan/ perkebunan dan 223 Ha permukimam. Disamping itu, wilayah Kecamatan Beutong yang berada diantara bentangan sawah dan pergunungan

yang subur sangat berpotensi dikembangkan untuk menjadi lahan yang produktif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Penduduk Kecamatan Beutong pada umumnya bermata pencaharian sebagai Petani 3.200 Orang (70%), Pedagang 150 Orang (10%), Pegawai Negeri Sipil 262 Orang (10%), Tukang 80 Orang (5%), dan lain –lain 80 Orang (5%)

Potensi Kependudukan pada Kecamatan Beutong sangatlah berpotensi dalam rangka mendukung sektor Pertanian. Sedangkan untuk sektor lain seperti Industri Rumah Tangga dan Perdagangan dapat dijadilkan sektor yang akan menunjang perkembangan kecamatan dimasa yang akan datang.

Jumlah Penduduk Wilayah Kecamatan Beutong Berjumlah + 13.051 Jiwa dengan Kepadatan Penduduk rata-rata 10 Jiwa/Km^2 dan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakatnya sebahagian besar adalah sektor Pertanian, Perdagangan dan Sebahagian kecil PNS.

Kecamatan Beutong memiliki berbagai sarana prasarana dalam hal Pendidikan dimana di Kecamatan Beutong terdapat SD Negeri berjumlah 15 (lima belas) Unit, MIN 1 (satu) Unit sedangkan SLTP Negeri berjumlah 3 (tiga) Unit, MTsN Swasta 1 (satu) Unit, SMU 2 (dua) Unit dan untuk pendidikan non formal terdapat Pesantren sebanyak 3 (tiga) unit termasuk Pesantren inti dan 9 (sembilan) unit Pesantren Perdesaan. Dalam hal Kesehatan Kecamatan Beutong juga memiliki 1 (satu) Unit Puskesmas Pembantu dengan tenaga Kesehatan berjumlah 3 Orang Dokter dan 37 Orang Bidan serta para medis lainnya. Dapat disampaikan pula bahwa di Kecamatan Beutong juga telah dibangun 1 (satu) Unit Rumah Sakit Rawat Inap yang telah di Operasionalkan untuk kepentingan Masyarakat Beutong Khususnya dan Masyarakat luar Kecamatan Umumnya.

Kecamatan Beutong berada pada dataran yang relatif datar dan sedikit daerah perbukitan. Penggunaan lahan di Kecamatan Beutong pada umumnya berupa 1.725 Ha persawahan, 2.000 Ha perladangan/ perkebunan dan 223 Ha permukimam. Disamping itu, wilayah Kecamatan Beutong yang berada diantara bentangan sawah dan pergunungan yang subur sangat berpotensi dikembangkan untuk menjadi lahan yang produktif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Penduduk Kecamatan Beutong pada umumnya bermata pencaharian sebagai Petani 3.200 Orang (70%), Pedagang 150 Orang (10%), Pegawai Negeri Sipil 262 Orang (10%), Tukang 80 Orang (5%), dan lain –lain 80 Orang (5%)

Potensi Kependudukan pada Kecamatan Beutong sangatlah berpotensi dalam rangka mendukung sektor Pertanian. Sedangkan untuk sektor lain seperti Industri Rumah Tangga

dan Perdagangan dapat dijadilkan sektor yang akan menunjang perkembangan kecamatan dimasa yang akan datang.

2.2.3 Susunan Kepegawaian SKPD

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Beutong didukung oleh 51 (lima puluh satu) orang pegawai sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1

Susunan Kepegawaian Kecamatan Beutong

Berdasarkan Struktural

Tingkat Jabatan	Jumlah
Eselon III A	1 orang
Eselon III B	1 orang
Eselon IV A	5 orang
Eselon IV B	2 orang
Staff *)	42 orang
Jumlah	**51 orang**

Tabel 2.2

Susunan Kepegawaian Kecamatan Beutong

Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan Ruang	Jumlah
IV	2 orang
III	11 orang
II & I	38 orang
T. Kontrak	12 orang
Jumlah	**63 orang**

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Beutong Desember 2013

2.3 KINERJA PELAYANAN

Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 12 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Gampong, dinyatakan bahwa Kecamatan mempunyai tugas–tugas dalam membantu Bupati untuk penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan Kecamatan Beutong untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3. Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat yang menjadi ruang lingkup bidang tugas;
4. Pelaksanaan pelimpahan sebagaian kewenangan pemerintah kota meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi,penetapan dan penyelenggaraan;
5. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
6. Pelaksanaan Evaluasi, pelaporan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tingkat Kecamatan dan Gampong;
7. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTITIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Beutong sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 12 Tahun 2008, maka Kecamatan Beutong mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Jumlah personil PNS yang ada di Kecamatan Beutong sangat terbatas , sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan
2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelayanan yang diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.ha ini dikarenakan terkendala oleh anggaran yang ada, sehingga pengalokasian anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam pelayanan public belum bisa fasilitasi
3. Tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Beutong tidak tercapai secara optimal seperti yang diharapkan. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor tidak adanya dorongan dari pemerintah khususnya terkait permodalan dan pelatihan karena sebagian dari pelaku usaha tersebut termasuk golongan pelaku usaha dengan keterbatasan modal sehingga belum bisa mandiri secara finansial dan kreatifitas.
4. Jumlah Warga miskin di Kecamatan Beutong belum memperlihatkan pengurangan yang berarti. Hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor di antaranya belum adanya kemandirian dan jiwa kewirausahaan dari warga penerima bantuan sehingga barang-barang bantuan yang diterima tidak dimanfaatkan dengan baik untuk menunjang kebutuhan hidupnya.
5. Upaya untuk menggerakkan dan menyemangati masyarakat akan pentingya pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Untuk memberdayakan masyarakat ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan yaitu :*mobilisasi (community mobilization),* partisipasi masyarakat *(community participation),* pembangunan berbasis masyarakat *(community development).* Ketiga pendekatan ini, tentunya akan diarahkan pada dua tujuan pemberdayaan, yaitu : melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan

kemiskinan, yang dikenal sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat dan memperkuat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan, yang dikenal sebagai pemberdayaan politik masyarakat. Permasalahan yang dirasakan masih ada dan perlu mendapatkan perhatian di Kabupaten Nagan Raya adalah masyarakat harus diberikan ruang yang lebih luas lagi untuk masyarakat menjadi berdaya, baik berdaya dibidang ekonomi, bidang sosial , bidang keamana maupun berdaya dibidang politik masyarakat.

3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

3.2.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Bupati Nagan Raya, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Beutong sesuai dengan RPJMD Kabupaten Nagan Raya. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya masyarakit adil dan makmur, aman dan damai berlandaskan nilai-nilai Islami serta terlaksananya sistem pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN demokratis dan terbuka (good governance)”

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, aman dan damai melandaskan nilai-nilai Islami serta terlaksananya sistem pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN demokratis dan terbuka (good governance), maka ditetapkan misi sebagai berikut :

a. Misi Kesatu

   Peningkatan pengamalan syariat islam dan penegakan hokum seadil-adilnya dalam setiap kehidupan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

b. Misi Kedua

   Miningkatnya Perekonomian Berbasis Kerakyatan (PER) agar terciptanya perekonomian daerah yang tangguh dalam upaya pengentasan kemiskinan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera

c. Misi Ketiga

   Mewujudkan system pendidikan formal dan non formal yang kuat guna meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan berwatak islami

d. Misi Keempat

   Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

e. Misi Kelima

Meningkatkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya dalam masyarakat sebagai pengikat persatuan bangsa

f. Misi Keenam

Membangun kerjasama dalam berbagai bidang baik domestic maupun Internasional guna percepatan pembangunan daerah.

g. Misi Ketujuh

Peningkatan prifesionalme bagi aparatur pemerintah guna terwujudnya pemerintah yang bersih, berwibawa dan bebas dari KKN

h. Misi Kedelapan

Membangun serta mengembangkan sarana dan prasarana dasar pemerintah, ekonomi, social dan kemasyarakatan.

Berdasarkan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017, serta memperhatikan permasalahan dan tantangan dalam jangka menengah ke depan, dirumuskan lebih lanjut ke dalam sejumlah pilar / program pembangunan prioritas yang akan diimplementasikan secara bertahap dan berkelanjutan. Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi, yaitu :

1. Penegakan Syariat Islam secara kaffah
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Nagan Raya
3. Peningkatan kualitas pendidikan
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat
5. Peningkatan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat
6. Peningkatan Investasi dan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Ketentuan Pasal 120 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerahmeyebutkan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai Pelaksana dan mengkoordinasi tugas-tugas Kepala Derah di Wilayah Kecamatan. Kecamatan sebagai unit Pemerintahan dalam roda Pemerintahan Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam peningkatan Pelayanan Masyarakat, untuk mencapai hal tersebut Sekretariat Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya menetapkan Visi “Mengutamakan Pelayanan Prima, Pembangunan Ekonomi dan Penegakan Syariah Islam menuju masa Sejahtera dan Madani”

Berdasarkan Visi yang telah dirumuskan diatas, Kantor Camat Beutong menetapkan Visinya “Meningkatkan Pelayanan terhadap Masyarakat, Pelaksanaan Syariat Islam serta mengembangkan kegiatan Perekonomian dan meningkatkan Sarana/Prasarana dalam Gampong” yang dilaksanakan melalui :

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi terhadap Masyarakat.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan Gampong.
3. Peningkatan Perekonomian Masyarakat yang berdasarkan Ekonomi Rakyat
4. Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam dengan pembangunan Sarana dan prasarana Ibadah.
5. Peningkatan Pembangunan Sarana dan prasarana Masyarakat untuk mewujudkan Masyarakat yang Makmur dan Sejahtera.
6. Tercapainya Lingkungan Bersih, bebas Penyakit dan Masyarakat yang Sehat.

3.3 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Beutong yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 12 Tahun 2008, maka Kecamatan Beutong mempunyai tugas dan fungsi dalam membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Utamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan perencanaan program dan kegiatan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Beutong dalam mencapai visi dan misinya selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik
2. Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik apalagi dengan adanya perubahan sistem manajemen kepegawaian dengan terbitnya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berpotensi peningkatan kualitas aparatur pemerintahan
3. Modernisasi penyelenggaraan pemerintahan didukung aparatur profesional, inovatif dan amanah khususnya dalam perubahan sistem manajemen keuangan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang berpotensi pada perubahan administrasi penatausahaan keuangan dan aset Kecamatan Beutong
4. Adanya keterbukaaan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan
5. Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan.
6. Isu pemanasan Global dan kualitas lingkungan kecamatan
7. Peningkatan gangguan keamanan
8. Peningkatan Sistem Hankamrata
9. Perkembangan perdagangan dan jasa serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
10. Kenaikan inflasi
11. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
12. Penanggulangan kemiskinan
13. Program Nasional Pembangunan Berkelanjutan
14. Penanaman pendidikan kesehatan sejak dini.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI

Berdasarkan Ketentuan Pasal 120 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah meyebutkan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai Pelaksana dan mengkoordinasi tugas-tugas Kepala Derah di Wilayah Kecamatan. Kecamatan sebagai unit Pemerintahan dalam roda Pemerintahan Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam peningkatan Pelayanan Masyarakat, untuk mencapai hal tersebut Sekretariat Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya menetapkan Visi "Mengutamakan Pelayanan Prima, Pembangunan Ekonomi dan Penegakan Syariah Islam menuju masa Sejahtera dan Madani"

Berdasarkan Visi yang telah dirumuskan diatas, Kantor Camat Beutong menetapkan Visinya "Meningkatkan Pelayanan terhadap Masyarakat, Pelaksanaan Syariat Islam serta mengembangkan kegiatan Perekonomian dan meningkatkan Sarana/Prasarana dalam Gampong" yang dilaksanakan melalui :

7. Peningkatan Pelayanan Administrasi terhadap Masyarakat.
8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan Gampong.
9. Peningkatan Perekonomian Masyarakat yang berdasarkan Ekonomi Rakyat
10. Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam dengan pembangunan Sarana dan prasarana Ibadah.
11. Peningkatan Pembangunan Sarana dan prasarana Masyarakat untuk mewujudkan Masyarakat yang Makmur dan Sejahtera.
12. Tercapainya Lingkungan Bersih, bebas Penyakit dan Masyarakat yang Sehat.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari pada Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi terhadap Masyarakat.
2. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat pada Aparatur melalui Peningkatan Pelayanan yang Prima yang didasarkan pada Standar mutu.
3. Meningkatkan Sarana dan prasarana untuk Kesejahteraan Masyarakat.
4. Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam di dalam Masyarakat.

Sasaran yang diterapkan dari Visi dan Misi tersebut adalah :

1. Tercapainya Pelayanan yang Administrasi dan Relevan
2. Tercapainya Kualitas Aparatur melalui Peningkatan Pengetahuan, Ketrampilan serta disiplin yang tinggi
3. Tercapainya Kepercayaan Masyarakat melalui Pelayanan yang Prima yang didasarkan pada Mutu

4. Tercapainya Perubahan Sikap Mental Aparatur Pemerintahan dalam Kecamatan Beutong
5. Tersedianya Sarana dan Prasarana dalam Gampong
6. Terlaksananya Syariat Islam sesuai dengan Nilai-nilai Budaya

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah cara atau usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dirancang secara konseptual, analitas, realitis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, maka Kebijakan Pembangunan Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya sampai dengan akhir tahun 2013 dirumuskan sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan misi “Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan” maka ditetapkan Kebijakan
    1. Optimalisasi system Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
    2. Penyediaan Fasilitas penyempaian aspirasi masyarakat
    3. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan
    4. Pengiriman aparatur untuk mengikuti Bimtek
    5. Optimalisasi sosialisasi bagi aparatur
    6. Perumusan rencana kebutuhan pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
    7. Penyediaan sistem pelaporan yang efektif dan efisien
    8. Penyediaan informasi public dalam penyelenggaraan pemerintahan
2. Dalam rangka mewujudkan misi “*Meningkatkan kinerja Pembangunan yang Berbasis Masyarakat dan Berwawasan Lingkungan*” maka ditetapkan Kebijakan
    1. Penyediaan wadah masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan
    2. Penyediaan kebutuhan untuk melestarikan lingkungan
3. Dalam rangka mewujudkan misi “M*eningkatkan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang Berkualitas*” maka ditetapkan Kebijakan Penyediaan sarana dan prasarana untuk menjaga keamanan dan ketretiban masyarakat.
4. Dalam rangka mewujudkan misi ” *Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dalam Rangka Optimalisasi PAD*” maka ditetapkan Kebijakan 1. Penyediaan wadah untuk pengembangan UKM.
    2. Sosialisasi, intensifikasi dan monitoring penerimaan Pajak dan Retribusi.

5. Dalam rangka mewujudkan misi ” *Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Sejahtera*” maka ditetapkan kebijakan
    1. Penyantunan bantuan kemiskinan bagi keluarga kurang mampu.
    2. Penyediaan wadah dalam upaya peningkatan kesehjateraan keluarga
    3. Penyediaan fasilitas olahraga bagi kalangan pemuda
    4. Monitoring dan Evaluasi UKS di sekolah-sekolah.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF

5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang ditetapkan di tingkat satuan kerja dalam menunjang pencapaian sasaran di tingkat Kabupaten. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah ini merupakan implementasi/penjabaran dari program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan (Program Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran indikator kinerja yang ditetapkan di tingkat Kabupaten.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu, yang dilakukan oleh kelompok sasaran. Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik internal maupun eksternal Kecamatan Beutong. Untuk mencapai itu diperlukan suatu pendanaan yang lebih kita kenal dengan istilah pendanaan indikatif.

Pendanaan indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber dana pendanaan indikatif pada Kecamatan Beutong selama 5 (lima) tahun kedepan berasal dari APBD Kabupaten Nagan Raya. Dengan demikian besarannya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Beutong untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Beutong. Untuk mengetahui secara rinci dapat kita lihat pada tabel 5.1 sebagaimana terlampir.

5.2 INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada tahun anggaran 2013 Kantor Camat Beutong telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya yaitu menyusun dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Adapun dokumen dimaksud yang sudah diselesaikan pada tahun anggaran 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 adalah:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
c. Renstra KANTOR CAMAT BEUTONG masih dalam proses penyusunan dan penetapan.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja KANTOR CAMAT BEUTONG dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) KANTOR CAMAT BEUTONG Tahun 2015.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategi Tahun 2013, Belanja Daerah Kantor Camat Beutong Kabupaten Nagan Raya dianggarkan sebesar Rp. 3.769.208.817,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.678.795.414,- atau sebesar 98%, dalam pelaksanaannya ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukkan bagi Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program).

Adapun ruang lingkup kegiatannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung terdiri atas Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) dimana sampai dengan Akhir Bulan Desember 2013 sebesar Rp 2.010.644.317,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.946.769.997,- (97,00%) terdiri dari :

1) Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 1.608.794.317,-
2) Belanja TPP sebesar Rp. 401.850.000,-

B. Belanja Langsung

Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp 1.758.564.500,- dan hingga Akhir Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 1.730.319.275,- (98,00%) dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Program Penataan Administrasi Kependudukan**

a) **Operasional Petugas E-KTP Kecamatan**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 12.000.000,- dengan rincian Rp. 7.000.000 untuk uang lembur, Rp. 2.000.000,- untuk belanja ATK dan Rp. 3.000.000 untuk belanja makanan dan minuman lembur, dan hingga akhir Desember 2013 telah terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,- atau sebesar 100,00 %.

2. Program Pelayanan administrasi Perkantoran.

a) Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.830.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 1.830.000,- atau 100,00%. Kegiatan ini menghasilkan administrasi surat menyurat (Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya)

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.830.000,- dan telah terealisir sebesar Rp. 5.770.000,- atau 99,00%. Adapun kegiatan-kegiatannya berupa:

- Belanja Listrik dianggarkan Rp. 55.000.000,- dan telah terealisasi Rp. 4.750.000,- atau 100%;
- Belanja Surat Kabar/Majalah dianggarkan Rp. 1.080.000,- dan telah terealisasi Rp. 1.020.000,- atau 94%;

c) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar **Rp** 2.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 2.500.000,- atau 100%. Kegiatan ini berupa Belanja kebersihan dan bahan pembersih.

d) Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 12.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 12.500.000,- atau 100%.

e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 7.400.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 7.400.000,- atau 100%. Kegiatan ini berupa belanja Cetak sebesar Rp 4.000.000,- dan belanja penggandaan sebesar Rp. 3.400.000,-.

f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.250.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 3.250.000,- atau 100%. Kegiatan ini berupa belanja alat listrik dan elektronik.

g) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 19.980.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 19.930.000,- atau 99%. Kegiatan ini berupa

- Belanja modal pengadaan AC sebesar Rp. 4.980.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.980.000,- atau 100 %
- Belanja modal pengadaan computer sebesar Rp. 12.000.000 dan telah terealisai sebesar Rp. 11.950.000,- atau 99 %
- Belanja modal pengadaan printer sebesar Rp. 3.000.000 dan telah terealisai sebesar Rp. 3.000.000,- atau 100 %

i) Penyediaan makan dan minum

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 69.550.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 68.967.000,- atau 99%. Adapun kegiatan-kegiatannya berupa:

- Belanja makanan dan minuman harian pegawai dianggarkan Rp. 57.000.000,- dan telah terealisasi Rp. 56.417.000,- atau 99%;
- Belanja Makanan dan minuman rapat dianggarkan Rp. 7.550.000,- dan telah terealisasi Rp. 7.550.000,- atau 100%;
- Belanja makanan dan minuman tamu dianggarkan Rp. 5.000.000,- dan telah terealisasi Rp. 5.000.000,- atau 100%;

j) Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, dan tugas kedinasan lainnya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 90.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 90.000.000,- atau 100%. Adapun kegiatan-kegiatannya berupa:

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah dianggarkan Rp. 30.000.000,- dan terealisasi Rp. 30.0000.000,- atau 100%;
- Belanja perjalanan dinas luar daerah dianggarkan Rp. 60.000.000,- dan terealisasi Rp. 60.000.000,- atau 100%;

k) Penyediaan jasa pegawai non pns dan jasa lainnya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.281.905.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 1.255.355.000,- atau 98%.

l) Penunjang tugas pokok kepala kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 122.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 122.000.000,- atau 100%. Adapun kegiatan-kegiatannya berupa:

- Belanja penunjang tugas pokok kepala kantor dianggarkan Rp. 40.000.000,- dan terealisasi Rp. 40.000.000,- atau 100%;
- Belanja hari-hari besar Islam/HUT RI dan Nagan Raya dianggarkan Rp. 35.000.000,- dan terealisasi Rp. 35.000.000,- atau 100%;

- Belanja pelaksanaan MTQ Kecamatan dianggarkan Rp. 35.000.000,- dan terealisasi Rp. 35.000.000,- atau 100%;
- Belanja kegiatan dharma wanita dianggarkan Rp. 5.000.000,- dan terealisasi Rp. 5.000.000,- atau 100%;
- Belanja kegiatan musrenbang kecamatan dianggarkan Rp. 7.000.000,- dan terealisasi Rp. 7.000.000,- atau 100%;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

a) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 90.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 90.000.000,- atau 100%. Adapun kegiatan-kegiatannya berupa:

b) Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 14.809.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp 14.759.275,- atau 99%. Adapun kegiatan-kegiatannya berupa:

- Belanja jasa service dianggarkan Rp. 600.000,- dan terealisasi Rp.600.000,- atau 100%;
- Belanja penggantian suku cadang dianggarkan Rp. 1.600.000,- dan terealisasi Rp. 1.600.000,- atau 100%;
- Belanja BBM, gas dan pelumas dianggarkan Rp. 11.239.050,- dan terealisasi Rp. 11.050.000,- atau 100%;
- Belanja STNK dianggarakan sebesar Rp. 950.000,- terealisasi Rp. 900.225,- atau 95%
- Belanja doorsmeer dianggarkan sebesar Rp. 420.000 terealisasi Rp. 420.000,- atau 100%

c) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 1.500.000,- atau 100%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.910.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 20.808.000,- atau 99%.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan.

a) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.600.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 1.800.000,- atau 69%.

TABEL T-VI.C.6

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

SKPK : KANTOR CAMAT BEUTONG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2014	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan KANTOR CAMAT BEUTONG Tahun 2014			Target Program/ Keluaran Renstra SKPD Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra KANTOR CAMAT BEUTONG Tahun 2015		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian (%)	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										

01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Manajemen Administrasi surat menyurat tertata rapi	Terselenggaranya Jasa Surat menyurat		Terselenggaranya Jasa Surat menyurat	Terselenggaranya Jasa Surat menyurat	99,90	Administrasi surat menyurat berupa belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya selama 1 tahun	100	100	
01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya produktivitas kerja melalui penyediaan jaringan listrik, air minum dan telekomunikasi selama 1 tahun	Terselenggaranya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Terselenggaranya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan	Terselenggaranya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan	94,17	Penyediaan jasa kantor berupa belanja telepon, air minum, listrik dan surat kabar/majalah selama 1 tahun	100	100	
01.08	Penyediaan	Tertatanya	Tersedian		Tersedianya	Tersedianya	100	Tersedianya	100	100	

	Jasa Kebersihan Kantor	keindahan, kebersihan dan kenyamanan suasana perkantoran	ya jasa kebersihan kantor		jasa kebersihan kantor selama 1 tahun anggaran	jasa kebersihan kantor selama 1 tahun anggaran		jasa kebersihan kantor berupa belanja alat kebersihan dan bahan pembersih selama 1 tahun			
01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan ATK selama 1 tahun	Tersedianya kebutuhan ATK		Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100	Tersedianya kebutuhan ATK	100	100	
01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya penyediaan barang cetakan dan pengganda an		Tersedianya Bahan cetakan dan penggandaan 1 tahun anggaran	Tersedianya Bahan cetakan dan Penggandaan 1 tahun anggaran	100	Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	100	
01.12	Penyediaan	Terjaminny	Terpenuhi		Terpenuhinya	Terpenuhinya	100	Terpenuhinya	100	100	

	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	a operasional kantor berkat tersedianya peralatan listrik dan elektronik	nya komponen instalasi listrik perkantoran		penggantian alat-alat listrik dan elektronik	penggantian alat-alat listrik dan elektronik		komponen instalasi listrik perkantoran berupa belanja alat listrik dan elektronik			
01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga		Tersedianya peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	100	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	100	100	
01.15	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang		Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	100	

			-undangan								
01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya snack untuk pegawai	Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai, rapat dan tamu		Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai, rapat dan tamu selama 1 tahun	Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai, rapat dan tamu selama 1 tahun	100	Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai, rapat dan tamu selama 1 tahun	100	100	
01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultansi, dan Tugas Kedinasan Lainnya	Terlaksanya rapat koordinasi, konsultasi di tingkat provinsi, regional dan nasional	Terjalinnya koordinasi dengan berbagai instansi/lembaga terkait		Terjalinnya koordinasi dengan berbagai instansi/lembaga terkait	Terjalinnya koordinasi dengan berbagai instansi/lembaga terkait	89,85	Terjalinnya koordinasi dengan berbagai instansi/lembaga terkait	100	100	
01.21	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa Lainnya	Meningkatnya kinerja tenaga	Tersedianya biaya jasa pegawai		Tersedianya biaya jasa pegawai non PNS	Tersedianya biaya jasa pegawai non PNS	96,52	Tersedianya biaya jasa pegawai non PNS	100	100	

		kerja Non PNS	non PNS								
01.18	Pelaksanaan Tugas Pokok Kepala Kantor	Terlaksanaan ya pelaksanaan Tugas Pokok Camat	Terlaksana nya Tugas Pokok Kepala kantor		Terlaksanany a Tugas pokok camat di kantor	Terlaksanany a tugas pokok camatdi kantor	100	Terlaksananya Tugas Pokok kepala kantor	100	100	
02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**										
02.09	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpelihara nya rumah dinas camat	Terpelihar anya rumah dinas camat		Terpeliharan ya rumah dinas camat	Terpeliharan ya rumah dinas camat	100	Terpeliharanya rumah dinas camat	100	100	
02.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tersedianya dana pemeliharaa n mobil jabatan kepala	Terpenuhi nya dana pemelihar aan mobil jabatan		Tersedianya dana pemeliharaan mobil jabatan kepala Kantor	Tersedianya dana pemeliharaan mobil jabatan kepala Kantor	95,86	Tersedianya dana pemeliharaan mobil jabatan kepala Kantor Camat	100	100	

		Kantor Camat Beutong			Camat Beutong	Camat Beutong		Beutong			
02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya dana pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100	Tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100	100	
03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**										
03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan kedisiplinan dan percaya diri pegawai	Tersediannya pakaian dinas untuk pegawai		Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai	Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai	100	Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai	100	100	

04	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan**										
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersediannya dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Tersusunnya dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100	Tersusunnya dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100	100	

BAB VI
INDIKATOR KINERJA

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Beutong, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Beutong yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tahun 2013-2017.

Indikator kinerja Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya selama 5 tahun kedepan (2013-2017) yang memberikan kontribusi terhadap tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagaimana terlampir.

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya selama 5 (lima) tahun mendatang, dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017.

Rencana Strategis Kecamatan Beutong Tahun 2013-2017 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renstra) Kecamatan Beutong dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Beutong sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Nagan Raya sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Strategis Kecamatan Beutong merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renstra) Kecamatan Beutong;
3. Rencana Strategis Kecamatan Beutong merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahun Kecamatan Beutong;
4. Kecamatan Beutong berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Kecamatan Beutong dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Beutong ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.

Babussalam, 10 November 2014
CAMAT BEUTONG
KABUPATEN NAGAN RAYA
dto
= SAMSUAR, SE =
Pembina
NIP. 19700508 199102 1 002